



NED-INDISCHE
ARTSENSCHOOL

Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Indonesia

Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG (K)

UNIVERSITAS AIRLANGGA

1 September 2021

8 Topik Bahasan



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



1. Mekanisme Pembukaan/ Penutupan FK/FKG dan Evaluasinya
2. Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Dokter/ Dokter Gigi Spesialis dan Subspesialis
3. Mahalnya Biaya Pendidikan Kedokteran
4. Kerjasama FK/FKG dengan dunia internasional termasuk pengaturan mengenai institusi Pendidikan kedokteran luar negeri yang akan membuka program Pendidikan dokter di dalam negeri
5. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sebagai “exit exam” untuk mendapatkan ijazah dokter/dokter gigi
6. Program adaptasi bagi lulusan program studi pendidikan kedokteran dari perguruan tinggi luar negeri
7. Pemerataan distribusi lulusan pendidikan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis
8. Kerancuan Nomenklatur Dokter Layanan Primer



ASEAN
University
Network



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION





**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Hidup pada tahun antara 460 sampai 377 SM.

LAFAL SUMPAH / JANJI DOKTER

Sebelumnya saya tanyakan kepada Saudara – Saudara,
Apakah Saudara bersedia diambil Sumpah / Janji ?

Untuk yang bersumpah tirukan saya,
Demi Allah, Saya bersumpah bahwa :

Untuk yang berjanji, tirukan saya,
Saya berjanji, bahwa :

Semuanya tirukan saya :

Saya akan membaktikan hidup saya / guna kepentingan perikemanusiaan; /

Saya akan menjalankan tugas saya / dengan cara yang terhormat dan bersusila / sesuai dengan martabat pekerjaan saya; /

Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga / martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran; /

Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui / karena pekerjaan saya / dan karena keilmuan saya sebagai dokter; /

Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan; /

Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita / saya akan berikhtiar dengan sungguh – sungguh / supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, / kebangsaan, / kesukuan, / politik kepartaian /atau kedudukan sosial; /

Saya akan memberikan kepada guru – guru saya / penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya; /

Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung; /

Saya akan menghormati setiap hidup insani / mulai dari saat pembuahan; /

Sekalipun diancam / saya tidak mempergunakan pengetahuan kedokteran saya / untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan perikemanusiaan; /

Untuk yang bersumpah :
Saya ikrarkan Sumpah ini dengan sungguh – sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Untuk yang berjanji :
Saya ikrarkan Janji ini dengan sungguh – sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Mengetahui :
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga

Surabaya,

Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp. OG (K)
NIP : 15630217 198911 1001

.....



ASEAN
University
Network



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Mekanisme Pembukaan/Penutupan FK/FKG dan Evaluasinya



Latar Belakang:

Makin banyak pendirian Fakultas Kedokteran baru di seluruh Indonesia dengan kualitas yang sangat bervariasi:

- Proses pendidikan, output pendidikan serta mutu lulusan masih di bawah standar
- Aspek akademik tidak bisa dipertanggungjawabkan
- Banyak yang tidak jelas visi dan misinya bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.



ASEAN
University
Network



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Mekanisme pembukaan/penutupan FK/FKG dan evaluasinya



- Perlu pengkajian kebutuhan FK sesuai wilayah, berdasar:
 - Denominator Penduduk Kota/Kabupaten
 - Denominator Penduduk Provinsi
- Segala sumber daya ditujukan untuk meningkatkan mutu lulusannya sehingga *gap* lulusannya tidak berbeda banyak.
- Indonesia butuh dokter namun tidak hanya secara kuantitas, tapi juga perlu kualitas dan terutama pemerataan.
- Pemetaan jumlah kebutuhan dokter/ dokter spesialis selain berdasarkan jumlah penduduk namun juga instansi layanan kesehatan → merupakan tanggung jawab pemerintah daerah & IDI
- Membuka FK/FKG baru sebanyak-banyaknya bukan solusi di saat visitasi tidak mampu terlaksana dengan baik. Regulasi harus diatur secara jelas.



ASEAN
University
Network



WORLD FEDERATION FOR
MEDICAL EDUCATION



Mekanisme Pembukaan/ Penutupan FK/FKG dan Evaluasinya



Perlu ada keseragaman **kriteria pendirian FK**, di antaranya:

- Studi kelayakan
- Naskah akademik
- RENSTRA
- SDM dengan jumlah yg cukup & sesuai dengan jenis keilmuan
- Sarpras yang memadai
- Rencana Induk Penelitian & Pengmas



Mekanisme penyelenggaraan pendidikan dokter/dokter gigi spesialis dan subspesialis

1. Pendekatan *Student Centred Learning* (berpusat pada karakteristik mahasiswa) dan Outcome Based Learning (berbasis kompetensi yang harus diraih)
2. Dipilih mahasiswa yang nantinya disiapkan untuk menjadi dosen = kejayaan bangsa
3. Peningkatan MBM softskills termasuk *entrepreneurship*
4. Memposisikan Sp2 sebagai puncak dari Pendidikan di bidang kedokteran bukan S3 (kecuali mereka dipersiapkan sebagai dosen)



Mahalnya biaya pendidikan kedokteran

- Wajib Kerja akan lebih memungkinkan untuk dijalankan jika biaya kuliah dokter/spesialis dijamin sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah
- Memerlukan pengkajian perihal besarnya biaya dari mahasiswa kedokteran di seluruh wilayah Indonesia
- Ini isu penting karena kesempatan anak pintar yang tidak mampu jadi hilang. Harus ada terobosan program pendidikan dokter yang terjangkau seperti tubel
- Kerja sama dengan BUMN/ Pemda untuk menjembatani distribusi dokter dan biaya pendidikan



Kerjasama FK/FKG dengan dunia internasional termasuk pengaturan mengenai institusi Pendidikan kedokteran luar negeri yang akan membuka program Pendidikan dokter di dalam negeri

- Sudah dilakukan di banyak Perguruan Tinggi Negeri → sebagai upaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi/ ranking universitas.

Di UNAIR sudah → FK → kerja sama nasional

kerja sama internasional : visiting professor/ adjunct professor, kuliah tamu, publikasi, promotor PhD program.

Jumlah Kerjasama internasional FK UNAIR : 29 PT Luar Negeri (DN: 45, RS: 32)

- Diarahkan supaya dapat menggeret mutu dan internasionalisasi FK tanpa mengaitkan dengan pendirian prodi kedokteran baru di dalam negeri



Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sebagai “exit exam” untuk mendapatkan ijazah dokter/dokter gigi

Latar Belakang:

- Mahasiswa kedokteran menjalani berkali-kali ujian meskipun proses pendidikan dokter sudah diakreditasi (sudah dianggap baik).
- Jumlah *retaker* cukup tinggi (6% = 3.547 mahasiswa)
- Tidak ada umpan balik bagi yang tidak lulus.
- Secara normatif, UKMPPD seringkali dinyatakan hanyalah sebagai “ujian *achievement*”.
- Berubahnya pola belajar yang hanya untuk lulus ujian → muncul banyak bimbingan belajar & banyak dijual buku-buku bimbingan UKMPPD → mendorong mahasiswa untuk bersikap **pragmatis**.
- Uji Kompetensi ini masih terbatas pada pengetahuan dan keterampilan.
- Uji Kompetensi di ranah afektif (*soft skills*) seperti komunikasi interpersonal, *self directed long learning*, masih kurang ter-ases.



Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sebagai “exit exam” untuk mendapatkan ijazah dokter/dokter gigi

Namun mengingat mutu FK di Indonesia masih besar variasinya :

- Perlu dipertahankan dengan tujuan untuk asesmen proses belajar mengajar dan manajerial pada FK dengan akreditasi C.
- Perlu dipertahankan – sebaiknya tidak hanya ditentukan dalam 2x ujian yaitu CBT dan OSCE, namun ada ujian ditahap sebelumnya yaitu uji tahap I dan uji tahap II /setelah semester 4 dan setelah semester 8, sedangkan setelah menyelesaikan pofesinya ada ujian OSCE saja. Institusi memberikan perhatian khusus mahasiswa yang berpotensi akan kesulitan saat Ujian pada tahap- tahap selanjutnya.



Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sebagai “exit exam” untuk mendapatkan ijazah dokter/dokter gigi

USULAN

- Tahap I → CBT setelah semester 4
- Tahap II → CBT setelah semester 6
- *Tahap I & II *exit exam* setelah semester 6
- Tahap III → OSCE setelah selesai semua kepaniteraan klinik (DM/Co-as 1 dan 2)



Program adaptasi bagi lulusan program studi pendidikan kedokteran dari perguruan tinggi luar negeri

- Program adaptasi sangat diperlukan, meski terdapat konsekuensi penambahan waktu dan biaya
- Perlu seleksi administrasi ketat, karena diduga ada program luar negeri yang hanya berupa kursus
- Apabila lulusan LN telah melalui program adaptasi dengan baik, maka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan lulusan dalam negeri.



Program adaptasi bagi lulusan program studi pendidikan kedokteran dari perguruan tinggi luar negeri

- Perlu disusun daftar fakultas kedokteran LN yang diakui oleh DIKTI untuk lulusannya diakui di Indonesia
- Program adaptasi harus punya standar kurikulum dan SOP yang jelas
- Pelaksanaan program adaptasi di senter pendidikan terakreditasi A, *University Based* (baik dr/drg, maupun spesialis/drg spesialis)- saat ini Peraturan KKI no 97, 2021 untuk spesialis KBA.



Pemerataan distribusi lulusan pendidikan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis

- Daerah terluar, tertinggal, terpencil seharusnya diprioritaskan untuk dipenuhi dulu baru daerah lain dan terakhir baru di Jawa
- Sangat penting dipikirkan kembali program inpres/PTT (walaupun bentuknya sudah harus disesuaikan) juga untuk para lulusan termasuk adaptan
- Produksi 12.000 dokter umum inilah yang sejak awal harus dipikirkan distribusinya – termasuk saat belum lulus
- Setiap FK → disertai wilayah-wilayah yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawabnya



Kerancuan Nomenklatur Dokter Layanan Primer

Sejarah pendirian DLP → Dokter Layanan Primer (DLP) merupakan Pendidikan “setara spesialis” → Penyusunan Standar Kompetensi DLP

Penyusunan Standar Kompetensi Dokter Keluarga

Peleburan menjadi “**Pendidikan Spesialis**” Kedokteran Keluarga Layanan Primer → Penyusunan Standar Kompetensi Spesialis KKLP

Perkonsil No. 65 Tahun 2019 tentang Standar “**Pendidikan Profesi Dokter Spesialis**” Kedokteran Keluarga Layanan Primer



Kerancangan Nomenklatur Dokter Layanan Primer

Pendidikan Spesialis selama ini di Indonesia → Layanan Sekunder

Pendidikan Spesialis KKLP →
Layanan Primer

Dokter Umum → Layanan
Primer

Terdapat banyak kesamaan (>70%) standar kompetensi Pendidikan Spesialis KKLP dengan standar kompetensi dokter (SKDI) yang mencakup **masalah kesehatan individu, komunitas, dan kesehatan masyarakat**



Kerancuan Nomenklatur Dokter Layanan Primer

- Terkait nomenklatur **prodi baru** spesialis KKLP, diperlukan pengkajian naskah akademik dan kurikulumnya yang dapat menunjukkan **70% kebaruan kompetensi keilmuan kedokteran keluarga** yang belum ada di profesi lain, baik di profesi dokter umum maupun di profesi spesialis lainnya.




“

Pendidikan Kedokteran bukan hanya melahirkan dokter berpikir egosentris kecukupan materi diri. Namun juga bertanggung jawab akan keselamatan dan kemajuan bangsa.

Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp. OG (K)





NED-INDISCHE
ARTSENSCHOOL

FACULTAS KEDOKTERAN

Terima Kasih